

2022



LAPORAN KINERJA

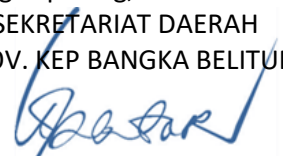
**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2023**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekreariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekreariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekreariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LkjiP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2023
SEKRETARIAT DAERAH
PROV. KEP BANGKA BELITUNG


Dr. Drs. NAZIARTO, SH.,MH
NIP.19640321 199103 1 009

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 Indeks Reformasi Birokrasi

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Rata-rata capaian kinerja (%) Formulasi Perhitungan : $13 = \text{Kebijakan Penataan Organisasi yang disusun} / \text{Kebijakan penataan organisasi yang diusulkan} \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 80% dari target PK 80% atau sebesar 100% tercapai.
- Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 9 (sembilan) Program, yakni Program Penataan Organisasi, Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 100 %; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 100 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 97,67%.

2. Capaian sasaran strategis 2 Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Total Rata-Rata Capaian Anggaran Dari Seluruh Program Formulasi

Perhitungan : $(100/50) \times 100\% = 100\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program/formula perhitungan di dalam PK) dari target 50% (target di PK) atau sebesar 100 % (realisasi dibagi target di kali 100)

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dan Program Perekonomian dan Pembangunan

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

- a. Beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya kebijakan PPKM, aturan yang berubah, tidak update dan aturan yang tumpang tindih.
- b. Kurangnya kompetensi SDM
- c. Tidak konsisiten dalam manajemen waktu untuk sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- d. Kebijakan kepegawaian menunggu pembagian pegawai yang sesuai kebutuhan
- e. Kurang koordinasi yang kuat antar unit terkait.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.....	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur.....	9
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	11
1.4 Isu-isu Strategis.....	12
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	12
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2022	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	21
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2022.....	26
3.3. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	33

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022	15
Tabel II.1 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	17
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	18
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	18
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Daerah Tahun 2022	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022	22
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 1	24
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja	25
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022	27

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar II.1. Website Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	10
Gambar II.2. Layanan Pengaduan Melalui Website Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

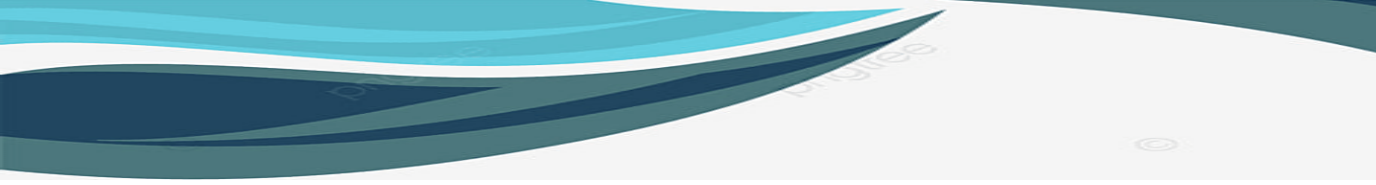
1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

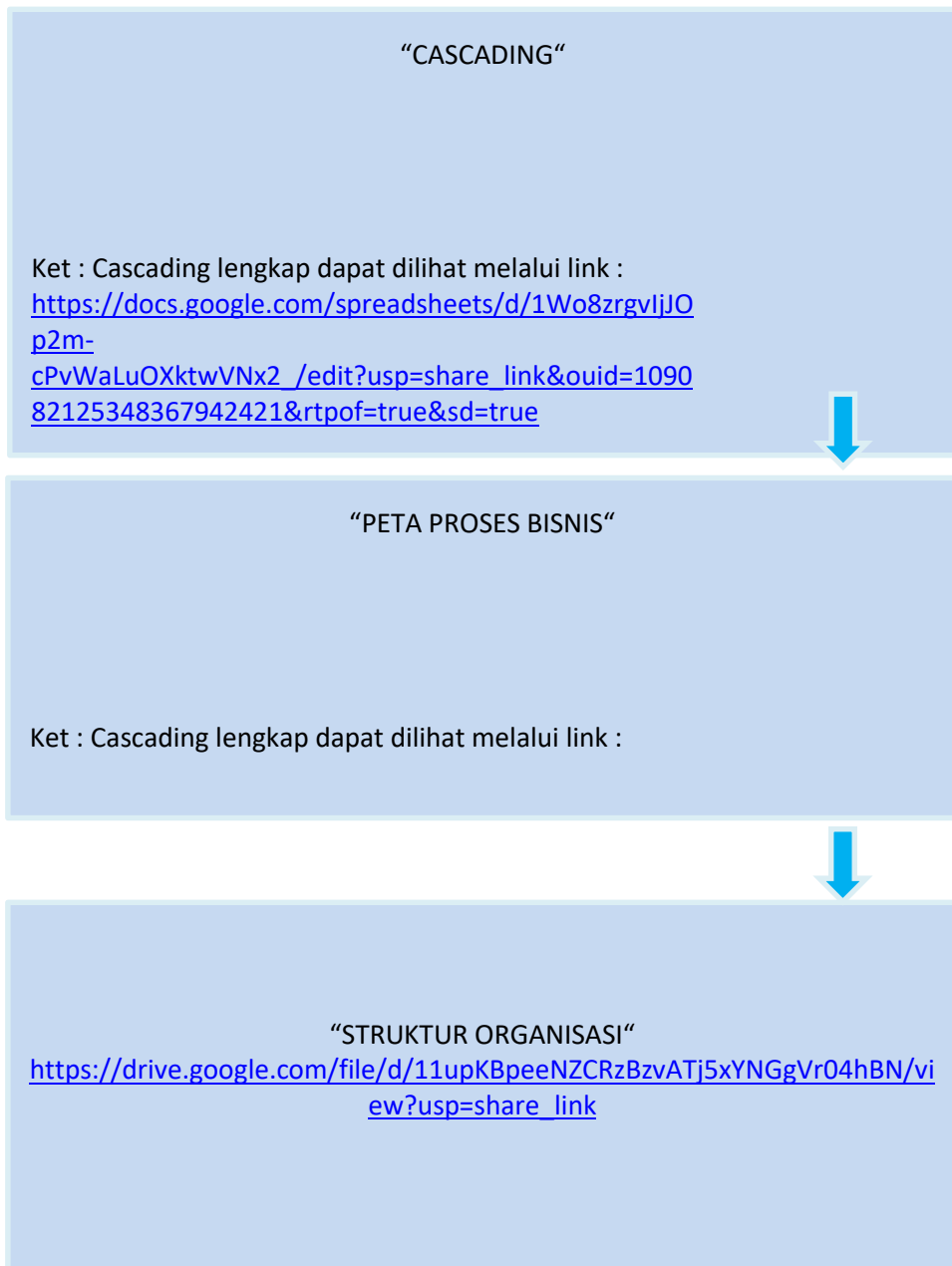
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.



1.1 *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Hubungan antara *cascading* kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
(halaman ini dapat di buat landscape)



1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Sekretariat Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi Adapun Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah Provinsi.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi.
- d. Pelayanan Administratif dan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah.
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



PETA JABATAN

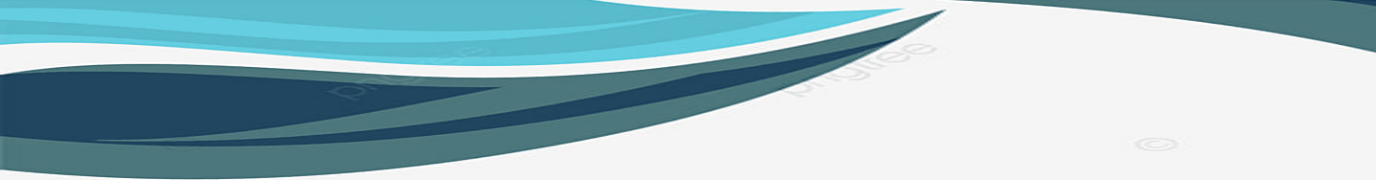
(pdf Peta Jabatan)

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan

berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi, Mewujudkan Kebijakan Daerah yang berkualitas”, antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah , administrasi kewilayahan, dan kerjasama serta mengoptimalkan pengelolaan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan, dan kerjasama.
2. Meningkatkan kelengkapan bahan penyusun kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran dan Meningkatkan koordinasi dibidang kesejahteraan rakyat.
3. Optimalisasi dan sinkronisasi terhadap produk hukum , penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta dokumentasi dan informasi hokum serta meningkatkan koordinasi bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum.
4. Menyusun rumusan dalam penyelenggaraan rekomendasi kebijakan dibidang admnistrasi perekonomian serta ,eningkatkan koordinasi penyelenggaraan dan pengendalian indikator ekonomi makro mikro.
5. Meningkatkan ketersediaan bahan pendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah serta meningkatkan keselarasan pembangunan daerah
6. Meningkatkan kualitas dalam bidang Layanan pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik serta meningkatkan kualitas dalam pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik
7. Penataan kebijakan kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi dan meningkatkan koordinasi dibidang kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan dan kepegawaian , administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi.

- 
8. Meningkatkan peran kehumasan dan keprotokolan dengan menyusun kebijakan yang lebih baik serta meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan keprotokolan.
 9. Meningkatkan kualitas di dalam penyusunan kebijakan yang ditetapkan di bidang rumahtangga, keuangan, dan aset setda serta meningkatkan koordinasi yang ditetapkan di bidang rumahtangga, keuangan, dan aset setda

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
A	JABATAN STRUKUTRAL												
1	Kepala Biro Hukum	1					1						
2	Kepala Bagian Peraturan perundang-undangan Kab/Kota	1					1		1				√
3	Kepala bagian bantuan Hukum	1					1		1			√	
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1					1		1				√
B	JABATAN FUNGSIONAL												
1	Analisis Hukum ahli Madya	1					1	1					√
2	Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli Madya	1					1	1				√	
3	Pustakawan ahli Madya	1		1			1		1			√	
4	Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli Muda	4	2	2			4	4	2			√	
5	Analisis Hukum ahli Muda	10	2	8			10	2	8			√	√
6	Pranata Humas ahli Muda	1		1			1		1			√	
7	Analisis Hukum ahli Pertama	2		2			2		2			√	
8	Pranata Komputer	0		1			0						
9	PBJ	0		1			0						
C	JABATAN PELAKSANA												

1	Analisis Produk Hukum	3		3		3		3			√	√
2	Analisis Rancangan naskah Perjanjian	2		1		1		1				√
3	Pengelola Informasi Hukum	1		1		1		1				√
4	Penyusun Anggaran Program dan Pelaporan	1		1		1	1					√
5	Bendahara				1	1			1			√
6	Pengadministrasi Hukum	2				2						
7	Pengadministrasi Kepegawaian	1				1	1			1	√	
8	Pengadministrasi Umum	1				1	1			1		√
9	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1				1	1			1	√	
10	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	1				1	1			1	√	
	Dst.....											
D	PHL											
1	Penyusun Anggaran Program dan Pelaporan	1				2		2			√	√
2	Analisis Produk Hukum	3				1		1				√
	Pengadministrasi Data peraturan perundang-undangan	2				2				2		√
3	Pengelola Kearsipan	1				1			1		√	
4	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	2				1				1		√
5	Pengadministrasi Hukum	2				1				1		

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENISKELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
A	JABATAN STRUKTURAL	2	1	1			2	1	1			2	
1	Kepala Biro Kesra	1	1				1	1				1	
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1		1			1		1			1	
B	JABATAN FUNGSIONAL	12	5	6	1		12	5	6	1		8	4
1	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya	3	3				3	3				3	
2	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	2	2				2	2				2	
3	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	4		4			4		4			3	1
4	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda	1		1			1		1				1
5	Jabatan Fungsional Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	1			1		1			1			1
6	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1		1			1		1				1
C	JABATAN PELAKSANA	14		12		2	14		12		2	8	6
1	Analis Kepemudaan	1		1			1		1			1	
2	Pengelola Kepegawaian	1		1			1		1			1	
3	Penyusun Bahan Urusan Agama	1		1			1		1				1
4	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	2		2			2		2			1	1
5	Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1		1			1		1				1
6	Analis Bina Kerukunan Agama	1		1			1		1			1	
7	Analis Hibah Daerah	3		3			3		3			1	2
8	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1		1			1		1			1	

9	Pengadministrasi Umum	2				2	2				2	1	1
10	Analisis Kesehatan	1		1			1		1			1	
D	PHL	13		10	1	2	13		10	1	2	7	6
1	Pengelola Administrasi	10		9	1		10		9	1		4	6
2	Pengadministrasi Umum	2				2	2				2	2	
3	Analisis Kesejahteraan Rakyat	1		1			1		1			1	

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI - LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
A	JABATAN STRUKUTRAL												
1	Kepala Biro Organisasi	1		1			1	1 (S3)					1
2	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1		1			1	1					1
3	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1		1			1		1				1
4	Kepala Bagian Tata Laksana	1		1			1		1			1	
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1		1			1		1			1	
B	JABATAN FUNGSIONAL												
1	JFT Analisis Kebijakan Ahli Madya	2		2			1	1				1	
2	JFT Pengadaan barang dan Jasa Ahli Pratama	1		1									

3	Subkoordinator Reformasi Birokrasi	1		1		1	1					1
4	Subkoordinator Akuntabilitas Kinerja	1		1		1		1				1
5	Subkoordinator Budaya Kerja	1		1		1		1				1
6	Subkoordinator Analisis dan Formasi Jabatan	1		1		1	1					1
7	Subkoordinator Analisis Organisasi	1		1		1		1			1	
8	Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1		1		1		1			1	
9	Subkoordinator Tata Laksana Pelayanan Publik	1		1		1		1				1
10	Subkoordinator Tata Laksana Pemerintahan	1		1		1		1				1
C	JABATAN PELAKSANA											
1	Analisis Kinerja	2		2		1		1			1	
2	Pengelola Data	2		2		1		1	1		1	
3	Pengelola Akuntabilitas	1		1		1			1			1
4	Analisis Organisasi	1		1		1		1				1
5	Analisis Kelembagaan	1		1		1		1				1
6	Analisis Jabatan	2		2		2		2			1	1
7	Analisis Tatalaksana	1		1		1	1				1	
8	Analisis Pelayanan Publik	1		1		1		1			1	
9	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	1		1		1		1			1	
10	Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	1		1		1		1			1	

11	Pengadministrasi Umum	2				2	2				2	1	1
13	Bendahara	1		1			1			1			1
D	PHL												
1	Pranata Komputer	1				1	1		1			1	
2	Pranata Kearsipan	1				1	1		1				1
3	Pengadministrasi Umum	1				1	1				1		1
4	Pengadministrasi Umum	1				1	1				1		1
5	Pengadministrasi Umum	1				1	1				1		1
6	Pengadministrasi Umum	1				1	1				1		1
JUMLAH		38					8	34	5	20	3	14	20

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA						JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI - LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		
A	JABATAN STRUKUTRAL														
1	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN	1		1				1		1				1	
2	KEPALA BAGIAN KERJASAMA	1		1				1		1					1
3	KASUBBAG TATA USAHA	1			1			1			1			1	
B	JABATAN FUNGSIONAL														
1	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA KOORDINATOR BAGIAN OTONOMI DAERAH	1	1					1	1					1	

2	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA KOORDINATOR BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1			1			1			1			1	
3	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1		1				1		1					1
4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PENINGKATAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN	1						0							
5	KASUBBAG FASILITASI KEPALA DAERAH DAN LEGISLATIF	1		1				1		1				1	
6	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR FASILITASI INSTANSI VERTIKAL	1			1			1			1				1
7	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KERJASAMA ANTAR DAERAH	1			1			1			1				1
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KERJASAMA SWASTA DAN LUAR NEGERI	1			1			1			1			1	

9	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR ADMINISTRASI PERTANAHAN	1			1			1			1			1	
10	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN WILAYAH DAN BATAS DAERAH	1			1			1			1			1	
11	PENERJEMAH AHLI MADYA	1						0							
12	PENERJEMAH AHLI MUDA	1						0							
13	JF. PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERTAMA	1						0							
14	JF. ARSIPARIS PENYELIA	1			1			0							
15	JF. ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	1			1			1			1				1
16	JF. PRANATA KOMPUTER PERTAMA	1			1			0							
17	JF. PRANATA KOMPUTER PENYELIA	1			1			0							
18	JF. PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	1			1			1				1			1
C	JABATAN PELAKSANA														
1	ANALIS PETA WILAYAH	1			1			1			1			1	
2	PENYURVEY BATAS WILAYAH ADMINISTRASI	1			1			1			1			1	

3	ANALIS TOPONIMI DAN DATA WILAYAH	1			1			0			1			
4	ANALIS PERTANAHAN	1			1			1			1			1
5	PENGELOLA INFORMASI PERTANAHAN	1				1		1				1		1
6	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	1			1			1			1			1
7	BENDAHARA	1			1			1			1			1
8	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	1				1		0				1		
9	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA	1				1		0				1		
10	PENGADMINISTRASI UMUM	1						1					1	1
11	ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH	1		1	2			1		1				1
12	ANALIS PEMERINTAH DAERAH	3			1			3		1	2			2
13	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	1			1			1			1			1
14	ANALIS DATA DAN INFORMASI	1			1			1			1			1
15	PENGEVALUASI PROGRAM DAN KINERJA	1			1			1			1			1
16	ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA	2			2			2			2			1
17	PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA	1				1		1				1		1

18	ANALIS KERJASAMA LUAR NEGERI	1			1			1			1				1
19	ANALIS SINERGITAS PENUGASAN URUSAN PEMERINTAH	1			1			1			1				1
20	ANALIS DEKONSENTRASI	1			1			0							
	Total	41	1	5	26	4	0	31	1	6	21	5	1	17	14

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMK		S2	S1	D3	SMA/SMK		
A	JABATAN STRUKUTRAL												
1	Kepala Biro PBJ	1		1			1		1			1	
2	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	1		1			1	1				1	
3	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1		1			1		1			1	
4	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi	1		1			1	1				1	
5	Kepala Sub Bagian Pembinaan SDM PBJ	1		1			1	1				1	
B	JABATAN FUNGSIONAL												
1	Subkoordinator Pemantauan Dan Evaluasi Pbj/Jf (Ppbj Ahli Muda)	1		1			1		1			1	
2	Subkoordinator Pengelolaan Strategi Pbj/Jf (Ppbj Ahli Muda)	1		1			1		1			1	

3	Subkoordinator Pelaksanaan Pbj/Jf (Ppbj Ahli Muda)	1		1			1	1				1	
4	Subkoordinator Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (JF Prakom Ahli Muda)	1		1			1		1			1	
5	Subkoordinator Pengembangan Sistem Informasi (JF Prakom Ahli Muda)	1		1			1		1			1	
6	Subkoordinator Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (JF Prakom Ahli Muda)	1		1			1		1			1	
7	Subkoordinator Pembinaan Kelembagaan Pbj /Jf (Perencana Ahli Muda)	1		1			1		1			1	
8	Subkoordinator Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa (JF Prakom Ahli Muda)	1		1			1	1					1
9	JF PPBJ Ahli Madya	4		1			1		1				1
10	JF PPBJ Ahli Muda	14		1			5		5			4	1
11	JF PPBJ Ahli Pertama	27		1			2		2				2
12	JF Pranata Komputer Muda	1		1									
13	JF Pranata Komputer Pertama	1		1			1		1			1	

14	JF Manggala Informatika Ahli Pertama	2		1								
15	JF Analis Kebijakan Ahli Madya	1	1									
16	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	1		1								
17	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	1		1								
18	JF Arsiparis Ahli Pertama	1		1								
C	JABATAN PELAKSANA											
1	Analis Perencanaan	1		1								
2	Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	1			1							
3	Analis Permasalahan Hukum	1		1		1		1				1
4	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	7		1		6		1			3	3
5	Analis Advokasi Hukum	1		1								
6	Pengelola Pengadaan Secara Elektronik	2			1							
7	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1		1		1		1			1	
8	Bendahara	1			1							
9	Pengelola Kepegawaian	1			1							
10	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1			1							
11	Pranata Kearsipan	1			1							
12	Pengadministrasi Umum	2				1						
13	Pengelola Pengaduan Publik	1			1		1			1		1

14	Analisis Sistem Informasi	1		1			1		1				1
D	PHL												
1													
2													
3													
		88				1	32	5	21	1		21	11

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SM P		S2	S1	D3	SMA/SMP		
A	JABATAN PIMPINAN TINGGI	1	1				1	1					
B	JABATAN ADMINISTRATOR	4	4				4	2	2				
C	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	14					7	2	10				
D	JABATAN FUNGSIONAL UMUM						54						
D	JABATAN PELAKSANA	91					78						

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
A	JABATAN STRUKUTRAL												
1	KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1					1						
2	ka..SUB BAGIAN TATA USAHA				1		1			1			√
B	JABATAN FUNGSIONAL												
1	JF.ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	3	1	2			3	1	2			2	1
2	JF.ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	1					1	1				√	
3	JF.ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	1	7			8	1	7			6	2
C	JABATAN PELAKSANA												
4	ANALIS PEREKONOMIAN	1		1			1		1				1
5	PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	2	1	1			2	1	1			1	1
6	ANALIS DATA DAN INFORMASI	3		3			3		3			1	2
7	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	2		2			2		2			2	
8	ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN	1		1			1		1			1	
9	ANALIS PEREKONOMIAN	1		1			1		1				1
10	PENUNYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	1		1			1		1			1	
11	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	2	1	1			2	1	1			1	1
12	PENGADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	1				1					1		1

13	ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA	3		3		3		3		√	√
2	PRANATA KOMPUTER	1			1	1			1	1	
3	BENDAHARA	1		1		1		1			√
4	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	1			1	1			1		1
5	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA	1				1				1	1
6	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	1									
7	PENGELOLA DATA	1									
8	PERENCANA AHLI MUDA	1									
8	PENGELOLA PENGADAAN BANRANG DAN JASA PERTAMA	1									
10	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PRATAMA	1									
11	PERENCANAAN AHLI PERTAMA ANALIS	1									
12	PERENCANAAN AHLI PERTAMA	1									
13	MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN	1									
14	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	1									
15	PENGELOLA DATA	1									
16	ANALIS PEMBANGUNAN										
D	PHL										
1	PERENCANAAN AHLI PERTAMA	1		1		1		1		1	
2	MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN	1		1		1		1			1
3	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	1		1		1		1			1
4	ANALIS PEMBANGUNAN	1		1		1		1			1
5	Pengadministrasi Umum	5			5	5			5	1	4

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM (Sumber Daya Manusia) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 154 orang (.....%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 47 orang (%), D3 sebanyak 3 orang (.....%), SLTA sebanyak 53 orang (....%), SLTP sebanyak orang (.....%), dan SD sebanyak orang (....%). Komposisi pegawai perempuan/laki-laki*) sedikit lebih banyak/sedikit*) dibanding pegawai perempuan/laki-laki*); bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak/sedikit*) dijabat perempuan/laki-laki*). Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	Tanah		Rp 276,613,980,783.00
2	Peralatan & Mesin		Rp 82,299,106,140.00
3	Alat Besar		Rp 5,656,787,968.00
4	Alat Angkutan		Rp 38,661,015,650.00
5	Alat Bengkel dan Alat Ukur		Rp 78,060,000.00
6	Alat Pertanian		Rp 32,000,000.00
7	Alat Kantor dan Rumah Tangga		Rp 29,263,491,715.00
8	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		Rp 1,839,232,149.00
9	Alat Kedokteran dan Kesehatan		Rp 128,100,000.00
10	Alat Laboratorium		Rp 86,720,000.00
11	Alat Persenjataan		Rp -
12	Komputer		Rp 6,472,223,658.00
13	Alat Eksplorasi		Rp -
14	Alat Pengeboran		Rp -
15	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		Rp -
16	Alat Bantu Eksplorasi		Rp -
17	Alat Keselamatan Kerja		Rp -
18	Alat Peraga		Rp -
19	Peralatan Proses/Produksi		Rp -
20	Rambu-Rambu		Rp -
21	Peralatan Olah Raga		Rp 81,475,000.00
22	Gedung dan Bangunan		Rp 147,908,380,414.00
23	Bangunan Gedung		Rp 147,595,660,414.00
24	Monumen		Rp -
25	Bangunan Menara		Rp 312,720,000.00
26	Tugu Titik Kontrol/Pasti		Rp -
27	Jalan, Irigasi & Jaringan		Rp 6,757,828,962.00
28	Jalan dan Jembatan		Rp 625,905,962.00
29	Bangunan Air		Rp 58,494,000.00
30	Instalasi		Rp 4,048,938,000.00

31	Jaringan	Rp	2,024,491,000.00
32	Asset Tetap Lainnya	Rp	350,079,950.00
33	Buku Perpustakaan	Rp	120,190,000.00
34	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Rp	229,889,950.00
35	Hewan	Rp	-
35	Biota Perairan	Rp	-
36	Tanaman	Rp	-
37	Barang Koleksi Non Budaya	Rp	-
38	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp	-
39	Konstruksi dlm pengerjaan	Rp	157,995,000.00
40	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	109,473,543,436.00
41	ASET LAINNYA	Rp	1,720,987,060.00
42	Aset Tak Berwujud	Rp	40,000,000.00
43	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp	40,000,000.00
44	Aset Lain-lain	Rp	1,720,987,060.00
45	Akumulasi Penyusutan aset lain-lain	Rp	-
46	BMD NON NERACA	Rp	2,225,161,380.00
47	BMD EKSTRAKOMTABLE	Rp	2,225,161,380.00
48	TOTAL (I + II)	Rp	408,912,632,908.00

Kendaraan operasional Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 60 unit kendaraan dinas jabatan, 13 unit kendaraan operasional, 25 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati : Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah/belum *) memadai. Hanya saja sebanyak % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak/mendukung*) tuntutan pekerjaan yang % berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2021	109.215.049.097	1.984.986.465,00	-		
2022	156.631.206.297	4.426.102.480	-		

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi ...(PD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 dibanding tahun 2021 terdapat kenaikan/penurunan*) Total anggaran belanja sebesar Rp Hal ini menunjukkan ada kendala/tidak ada kendala*) anggaran untuk membiayai program/kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2021 : Rekomendasi: 1. 2. 3. Dst.....	Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian terget kinerja (output dan outcome) Tahun 2021 dengan langkah-langkah: 1. 2. 3. dst

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda, meningkatkan Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi, Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Hukum, Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa) Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi PD Setda yang berkualitas

2. Mewujudkan Kebijakan Daerah yang berkualitas.

Adapun sasaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah, 2017-2022

(tabel ini dapat di buat landscape)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra	Ket
					2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda	Pencapaian RB PD Setda	%	-				76	79	79 %	
2.	Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi	Persentase Kebijakan Daerah yang terimplementasi	%	-				80	80	80 %	
3.	Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang ditetapkan	%	-				90	90	90 %	
4.	Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan	%	-				65	65	65 %	

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda	Mengembangkan Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Peningkatkan kebijakan otonomi daerah , administrasi kewilayahan, dan kerjasama serta Mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022 V.5 pelayanan publik yang tepat administrasi kewilayahan, dan kerjasama
2.	Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi	Mengembangkan Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi	
3.	Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Mengembangkan Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat, Mengembangkan Usulan Kebijakan Daerah dibidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
4.	Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	Mengembangkan Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan, Mengembangkan Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan, Mengembangkan Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1.Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	74.146.433.858	94.336.140.991	20.189.707.133
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.831.545.287	45.638.487.795	4.806.942.508
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	162.999.208	250.245.151	87.245.943
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.699.550	113.699.550	98.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.175.186.694	15.800.459.086	7.625.272.392
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	4.395.630.120	4.395.630.120
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.725.955.539	13.308.152.834	582.197.295
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.020.415.235	8.716.332.082	1.695.916.847
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.500.124.087	1.549.881.447	49.757.360
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.771.998.750	2.108.322.750	336.324.000
	Fasilitasi Keprotokolan	781.715.176	1.066.128.176	284.413.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	89.921.032	137.100.660	47.179.628
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.921.032	137.100.660	47.179.628
Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	452.428.026	774.836.000	322.407.974

	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	150.666.675	238.488.966	87.822.291
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	301.761.351	536.347.034	234.585.683
Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	6.528.649.402	6.237.651.513	(290.997.889)
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	73.556.221	448.030.941	374.474.720
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	279.670.011	1.442.658.467	1.162.988.456
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	6.175.423.170	4.346.962.105	(1.828.461.065)
Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	60.975.248.400	55.312.135.573	(5.663.112.827)
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	8.716.117.671	4.313.856.253	(4.402.261.418)
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	52.141.450.431	50.880.599.022	(1.260.851.409)
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	117.680.298	117.680.298	0
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.154.260.696	1.889.481.103	735.220.407
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.008.588.276	1.673.334.164	664.745.888
	Fasilitasi Bantuan Hukum	145.672.420	216.146.939	70.474.519
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	299.774.305	703.073.554	403.299.249
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	25.376.224	191.351.929	165.975.705
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	207.167.287	349.846.706	142.679.419
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	67.230.794	161.874.919	94.644.125
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.146.878.098	1.496.636.336	349.758.238

	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	468.795.005	597.742.684	128.947.679
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	535.025.889	624.544.890	89.519.001
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	143.057.204	1.496.636.336	349.758.238
	PROGRAM KEBIYAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	123.198.725	170.253.047	47.054.322
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	79.208.062	109.192.384	29.984.322
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	43.990.663	61.060.663	17.070.000
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		144.916.792.542	161.057.308.777	

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda	Persentase Usulan Kebijakan Daerah Dibidang Pentaan	%	80	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20 20 20 20
2		NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	%	82,96	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20.63 20.57 20.72 21.05
3		Persentase Usulan	%	50.00	Triwulan I	25

		Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Pengadaan			Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 0 0
4		Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	%	70	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	17,19 55,73 45,31 10,25
6		Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun	%	75	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	18,75 18,75 18,75 18,75
7		Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun	%	75	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	18,75 18,75 18,75 18,75
8		Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan	%	90	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
		Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun	%	90	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	19,44 19,44 22,50 22,50

Pada tahun 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda	Persentase Usulan Kebijakan Daerah Dibidang Pentaan	%	80	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20 20 20 20
2		NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	%	82,96	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20.63 20.57 20.72 21.05
3		Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Pengadaan	%	50.00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 25 0 0
4		Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	%	70	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	17,19 55,73 45,31 10,25
6		Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun	%	75	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	18,75 18,75 18,75 18,75
7		Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun	%	75	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	18,75 18,75 18,75 18,75
8		Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan	%	90	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
		Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun	%	90	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	19,44 19,44 22,50 22,50

Keterangan Tambahan:

1. Indikator Kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi anggaran berkurang/bertambah% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk pembiayaan
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
3. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga, yaitu:
 - 3.1. BTT dalam rangka :Rp.
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi, yaitu:
 - 4.1. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa : Rp. 801.820.000 Realisasi Rp 743.554.561

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2022

(tabel ini dapat di buat landscape)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda	Indikator: Nilai RBP PD Setda Formula Perhitungan:	%		101,97					100%
		Program Penataan Organisasi	%		100	774836000	517464484	84		100
2	Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi yang ditetapkan	%		100,00	80	80			84
3	Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang ditetapkan	%		90	1889481103	1680880998	90		-
		Program Kesejahteraan Rakyat			70	55.312.135.573	19331694428	106.25		-
4	Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan	%		86,87	1496636336	714880695	100		50
		Program Kebijakan Dan	%		86,87	1496636336	714880695	100		50

		Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa								
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan			75	170253047	169282742	75		100

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan

Kinerja sasaran Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	= LHE Reformasi Birokras KemenPAN-RB

Kinerja sasaran Meningkatkan tata kelola Pemerintahan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan LHE Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 90.95% *) contoh) atau sebesar 109,85% dari target 83%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022(%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	70	68,87	70	100	70	Kolom5 dibagi kolom 7 dikali 100

Analisis Ketercapaian Sasaran indeks reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- Tercapai 70 % , dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 70 %.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 70 % , terhadap target tahun lalu sebesar 100 terdapat peningkatan terhadap LKPJ Tahun lalu
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (siapkan PK Eselon 3 dengan sasaran, Indikator dan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon 3 yang mendukung Program ini, dan bisa lebih dari satu PK Eselon 3) dengan sasaran kinerja program meningkatnya kebijakan daerah dibidang Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun formula perhitungan indikator ini adalah jumlah realiasi Usulan Kebijakan yang menjadi Kebijakan / jumlah target Usulan Kebijakan yang menjadi Kebijakan X 100 %
Capaian Kinerja untuk indikator ini adalah $(100 \times 50) \times 100\% = 100\%$
(contoh perhitungan persentase capaian Program/Formula

perhitungan didalam PK) dari target 50 % (target di PK) atau sebesar 100% (realisasi dibagi target dikali 100)

2. Dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi mempunyai Indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja yang disusun formula perhitungan indikator ini adalah Kebijakan Daerah dibidang RB dan Akuntabilitas Kinerja yang disusun/ Kebijakan Daerah dibidang RB dan Akuntabilitas Kinerja yang diusulkan x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 80% dari target PK 80% atau sebesar 100% tercapai.

Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (jumlah dibagidikal 100%) = (14.350/16.204)x100%= 88,56% (cth)	68,87 %	99,14 %	70 %

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN DALEV TW .IV
2.		RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN DALEV TW .IV

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN.
- d. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.
- e. Adanya SAKIP RB Award mampu meningkatkan Komitmen Pimpinan.
- f. Adanya pembangunan aplikasi Sistem Monitoring pelaksanaan RB Terpadu (Si Molek RB)
- g. Meningkatkannya komitmen dan koordinasi antar leading sector 8 area perubahan.

- h. Adanya kebijakan nasional terkait penyederhanaan birokrasi, mendorong daerah melakukan persepatan proses penataan kelembagaan.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya kebijakan PPKM, aturan yang berubah, tidak update dan aturan yang tumpang tindih.
- b. Kurangnya kompetensi SDM
- c. Tidak konsisiten dalam manajemen waktu untuk sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- d. Kebijakan kepegawaian menunggu pembagian pegawai yang sesuai kebutuhan
- e. Sarana koneksi jaringan internet yang kurang stabil,
- f. Belum terintegrasinya beberapa aplikasi sistem dalam upaya pencapaian program kegiatan.
- g. Komitmen Pimpinan yang belum optimal;
- h. Tim RB Instansi Belum memahami peran dan fungsinya dalam pelaksanaan RB;
- i. Pelaksanaan RB yang masih bersifat dokumentatif;
- j. Mentalitas Silo yang masih tinggi;
- k. Masih adanya resistensi terhadap perubahan;
- l. Dan monitoring pelaksanaan yang belum dilaksanakan secara berkala.

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			efisieni
			Target	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi (%)	Realisasi (%)	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	SEKRETARIAT DAERAH								
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi Daerah yang tersusun	80	%	80%	774.836.000	756,791,399	80%	
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Usulan Rekomendasi Kelembagaan	80	%	80%		235,659,575	80%	
		Persentase Usulan Rekomendasi Analisis Jabatan							
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Usulan Rekomendasi Reformasi Birokrasi	80%		60%		521,131,824	60%	
		Persentase usulan rekomendasi Akuntabilitas Kinerja							
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	SEKRETARIAT DAERAH								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH							

		Survey Kepuasan Pelayanan Internal SETDA	80	%	82.96		88,341,665,719	82.96	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan SETDA	77	%	86.28		43,716,588,439	86.28	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Perlengkapan SETDA	80	%	81.46		250,245,151	81.46	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal SETDA	80	%	81.55		92,125,000	81.55	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga SETDA	80	%	81.46		15,215,160,781	81.46	
		Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan SETDA	77	%	86.28			86.28	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Perlengkapan SETDA	80	%	82.37		4,016,736,000	82.37	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal SETDA	80	%	81.46		12,228,305,612	81.46	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Perlengkapan SETDA	80	%	82.37		7,328,964,507	82.37	
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan SETDA	80	%	86.28		1,227,393,682	86.28	
	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan SETDA	80	%	81.46		1,892,014,900	81.46	
	Kegiatan Fasilitas Materi dan	Survey Kepuasan Pelayanan	80	%	81.46		1,368,697,662	81.46	

	Komunikasi Pimpinan	Protokol SETDA							
	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Survey Kepuasan Pelayanan Protokol SETDA	80	%	82.61		1,005,433,985	82.61	
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun	50	%	50.00	1.496.636.336	1,300,164,107	50.00	
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan	50	%	100.00		545,559,555	100.00	
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dikeluarkan	50	%	100.00		533,450,385	100.00	
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rekomendasi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan	50	%	100.00		221,154,167	100.00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun		70%	224%	55.312.135.573	50.306.320.904	224%	
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Rekomendasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang dikeluarkan		75%	164%			164%	

	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dikeluarkan	75%	484%			484%	
	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dikeluarkan	75%	25%			25%	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
	SEKRETARIAT DAERAH				1.010.427.261			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	76	BB	76		76	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD Setda yang disusun tepat waktu	90	%	100		100	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun	75	%	75		75	
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian yang dikeluarkan	65	%	100		100	

	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dikeluarkan	65	%	100			100	
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Rekomendasi Pengelolaan BUMD dan BLUD yang dikeluarkan	65	%	100			100	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun	75	%	75			75	
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan	65	%	100			100	
	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan	65	%	100			100	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan	90	%		1.889.481.103	1.680.880.998		
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase rekomendasi pemberian bantuan hukum masyarakat miskin dan penyelesaian masalah hukum Pemda	90	%					
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	SEKRETARIAT DAERAH								
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								

	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun	90	%		6.237.651.513	5.934.216.518		
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Rekomendasi Bagian Administrasi Kewilayahan yang dibuat	90	%	68.75			68.75	
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase rekomendasi bagian otda yang dibuat	90	%	56.25			56.25	
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Rekomendasi Bagian Kerjasama yang dibuat	90	%	58.3333333			90	
Jumlah						161.057.308.777	149.311.608.079	92,71	11.745.700.698
	Meningkatkan tata kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	68,87 %	99,14 %	70 %				
	Belanj Total Operasi					156.631.206.297	145.291.922.07	92,76	

Sumber: *http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2022, Laporan Keuangan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022*

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2022 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 161.057.308.777,00 terealisasi Rp 149.311.608.079,00 atau 92,71 sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 38.11 yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi sewa tempat
- Efisiensi biaya makanan dan minuman
- Dll..

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Aplikasi , untuk
- c. Dll...

3.4 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2022 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya kebijakan PPKM, aturan yang berubah, tidak update dan aturan yang tumpang tindih.
- 3 Kurangnya kompetensi SDM
- 4 Tidak konsisiten dalam manajemen waktu untuk sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- 5 Kebijakan kepegawaian menunggu pembagian pegawai yang sesuai kebutuhan
- 6 Sarana koneksi jaringan internet yang kurang stabil,
- 7 Belum terintegrasinya beberapa aplikasi sistem dalam upaya pencapaian program kegiatan.
- 8 Komitmen Pimpinan yang belum optimal;
- 9 Tim RB Instansi Belum memahami peran dan fungsinya dalam pelaksanaan RB;
- 10 Pelaksanaan RB yang masih bersifat dokumentatif;
- 11 Mentalitas Silo yang masih tinggi;
- 12 Masih adanya resistensi terhadap perubahan;
- 13 Dan monitoring pelaksanaan yang belum dilaksanakan secara berkala.

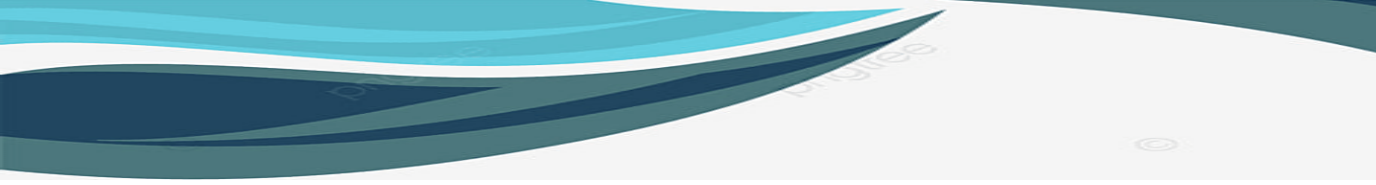
Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah:

1. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Sekretariat Daerah Provinsi

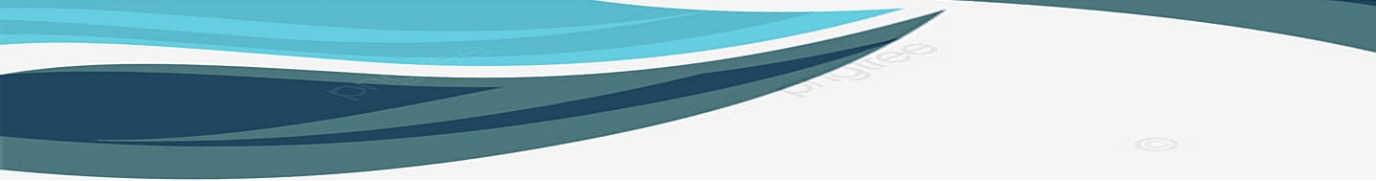
- 
- Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Koordinasi internal yang berjalan dengan baik. Koordinasi internal Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkala dan dikemas dalam acara *Coffee Morning*.
 3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
 4. Adanya kebijakan nasional terkait penyederhanaan birokrasi, mendorong daerah melakukan persepatan proses penataan kelembagaan.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian dan dinas terkait terhadap perencanaan terkait.
2. Melakukan koordinasi dalam rangka peran dan fungsi tim RB Instansi.
3. Menyiapkan data dan informasi dalam mendukung permasalahan isu-isu strategis;
4. Kegiatan merupakan kegiatan yang Rutin dilaksanakan tiap tahun,
5. Terjalannya kerjasama yang baik antar bagian bagian di Biro,
6. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Kegiatan sudah memadai.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017-2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BIRO PEMERINTAHAN								
	Terwujudnya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan publik yang tepat	Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Persentase uraian dalam LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
	Terwujudnya pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang efisien dan tepat	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kwilayahan dan kerjasama	Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %

Terwujudnya ASN pemerintah provinsi yang profesional dalam memberikan pelayanan Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
	Meningkatnya partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampiakan pendapat/aspirasi		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
BIRO KESRA							
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan	Persentase fasilitasi bidang keagamaan	75 %	85 %	80 %	85 %	85%
	Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos	Persentase masyarakat penerima hibah dan bansos yang terbaru	80 %	85 %	90 %	95 %	90 %
	Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata	Persentase perumusan kebijakan dan koordinasi bidang pendidikan KB, pemuda dan pariwisata	70 %	70 %	75 %	80 %	100 %
BIRO HUKUM							

	Terwujudnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, peyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	Persentase kualitas dan kuantitas produk hukum	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
			Persentase pelayanan hukum pemerintah daerah	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
			Persentase publikasi produk hukum	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
BIRO EKONOMI								
	Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang perekonomian	Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam	Persentase rekomendasi kebijakan terkait sumber daya alam	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
BIRO PEMBANGUNAN								
	Meningkatnya akuntabilitas penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Persentase fasilitasi kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan yang memanfaatkan	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
BIRO LAYANAN PENGADAAN								
	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah atau negara	Tercipatnya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif	Persentase belanja pengadaan melalui e-procurement	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %
BIRO ORGANISASI								

	Birokrasi yang bersih dan akurat	Meningkatnya nilai manajemen perubahan	Persentase Peningkatan komitmen pimpinan PD dan pegawai dalam melakukan RB	50 %	53 %	60 %	65 %	68 %
			Persentase pola pikir dan budaya kerja	40 %	44 %	47 %	52 %	56 %
			Persentase menurunnya resiko kegagalan	50 %	53 %	56 %	58 %	62 %
		Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien)	50 %	54 %	56 %	59%	62 %
		Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda	Persentase peningkatan ketatalaksanaan Pemda	55 %	60 %	62 %	64 %	68 %

		Meningkatnya nilai akuntabilitas	Persentase peningkatan nilai laporan kinerja	56 %	60 %	64 %	67 %	70 %
		Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik	Index pelayanan publik	50 %	54 %	58 %	62 %	68 %

BIRO UMUM

	Meningkatnya pelayanan umum dan kesekretariatan Setda	Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	62,51	64,46	65,42	66,40	67,40
		Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	62,51	64,46	65,42	66,40	67,40
		Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	62,51	64,46	65,42	66,40	67,40

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL								
	Tercapainya informasi kehumasan dan layanan keprotokolan yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik	Persentase informasi kehumasan yang diterima oleh publik	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani	Persentase agenda pimpinan daerah yang terlayani	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

“Scan dokumen PK Kepala Sekretariat Daerah”

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2021

Scan Dokumen LHE Akuntabilitas Sekretariat Daerah

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2021

Scan Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2021

Lampiran 5. SK IKU Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Scan IKU PD





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. ROFIKO, MTP

Jabatan : Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN

Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
STAF AHLI GUBERNUR BIDANG
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK,

Dr. Ir. ROFIKO, MTP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640206 199003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH**

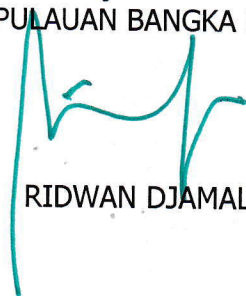
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Hukum dan Politik	- Persentase Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Hukum dan Politik yang disusun	50%	(Jumlah Kebijakan Daerah yg ditetapkan/Jumlah Rekomendasi Kebijakan Daerah yang dikeluarkan) x 100%

Anggaran :

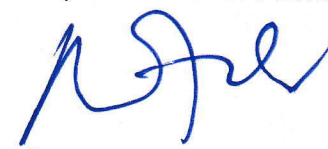
NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Hukum dan Politik yang disusun		Rp.	

Pangkalpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
STAF AHLI GUBERNUR BIDANG
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK,


Dr. Ir. ROFIKO, MTP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640206 199003 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YANUAR, SH., M.H

Jabatan : Asisten Perekonomian Dan Pembangunan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN

Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,

YANUAR, SH., M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19640608 198603 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH**

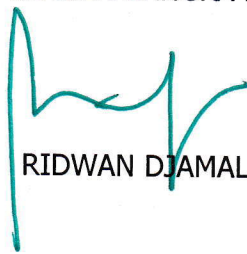
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Meningkatkan Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	- Persentase Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan	95%	(Jumlah Kebijakan Daerah yg ditetapkan/Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang dikeluarkan) x 100%

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan	1. Perekonomian Dan Pembangunan 2. Kebijakan Administrasi Pembangunan 3. Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp. 703.073.554 Rp. 170.253.047 Rp. 1.496.636.336	

Pangkalpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,


YANUAR, SH., M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19640608 198603 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. NAZIARTO, SH, MH

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN

Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. Drs. NAZIARTO, SH, MH
Pembina Utama
NIP. 19640321 199103 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Mewujudkan Kebijakan Daerah yang berkualitas	- Persentase Kebijakan Daerah yang terimplementasi	95%	(Jumlah Kebijakan yg terimplementasi / Jumlah Kebijakan Daerah yang dikeluarkan)x100%
	- Mewujudkan Reformasi Birokrasi PD Setda yang berkualitas	- Pencapaian RB PD Setda	BB	

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Persentase Kebijakan Daerah yang terimplementasi	1. Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 2. Kesejahteraan Rakyat 3. Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum 4. Perekonomian Dan Pembangunan 5. Kebijakan Administrasi Pembangunan 6. Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa 7. Penataan Organisasi	Rp. 6.237.651.513 Rp. 55.312.135.573 Rp. 1.889.481.103 Rp. 703.073.554 Rp. 170.253.047 Rp. 1.496.636.336 Rp. 774.836.000	
2.	Pencapaian RB PD Setda	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 94.473.241.651	

Pangkalpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. Drs. NAZIARTO, SH, MH
Pembina Utama
NIP. 19640321 199103 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. SUNARDI, M.AP

Jabatan : Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan Dan SDM

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN

Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
STAF AHLI GUBERNUR BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SDM,

Drs. H. SUNARDI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19631223 198603 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	- Persentase Kebijakan Daerah dibagian Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang disusun	50%	(Jumlah Kebijakan Daerah yg ditetapkan/Jumlah Rekomendasi Kebijakan Daerah yang dikeluarkan) x 100%

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang disusun		Rp.	

Pangkalpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
STAF AHLI GUBERNUR BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SDM,

Drs. H. SUNARDI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19631223 198603 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO KURNIAWAN, S.Sos., M.Si

Jabatan : Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN

Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
STAF AHLI GUBERNUR BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

EKO KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197009261997031007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH**

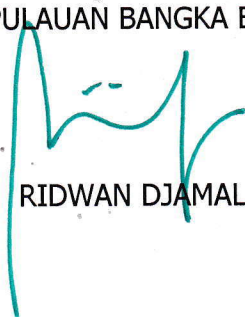
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Meningkatkan Kebijakan Daerah dibagian Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	- Persentase Kebijakan Daerah dibagian Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang disusun	50%	(Jumlah Kebijakan Daerah yg ditetapkan/Jumlah Rekomendasi Kebijakan Daerah yang dikeluarkan) x 100%

Anggaran :

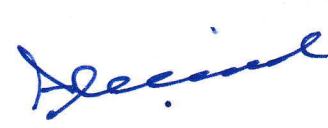
NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang disusun		Rp.	

Pangkalpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
STAF AHLI GUBERNUR BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,


EKO KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197009261997031007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M

Jabatan : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN

Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 198903 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Meningkatkan Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	- Persentase Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang ditetapkan	95%	(Jumlah Kebijakan Daerah yg ditetapkan/Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang dikeluarkan) x 100%

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang ditetapkan	1. Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 2. Kesejahteraan Rakyat 3. Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Rp. 6.237.651.513 Rp. 55.312.135.573 Rp. 1.889.481.103	

Pangkalpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 198903 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.YUNAN HELMI,M.Si

Jabatan : Asisten Administrasi Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN

Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

Drs.YUNAN HELMI,.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670505 199203 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi	- Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi yang ditetapkan	95%	(Jumlah Kebijakan Daerah yg ditetapkan/Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang dikeluarkan) x 100%
	- Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda	- Nilai RB PD Setda	BB	

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi yang ditetapkan	1. Penataan Organisasi	Rp. 774.836.000	
2.	Nilai RB PD Setda	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 94.473.241.651	

Pangkalpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

Drs.YUNAN HELMI,.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670505 199203 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam

Telp. (0717) 439326 Fax. (0717) 439320 Email: tupun-seto@gmail.com Pangkalpinang 33418

Pangkalpinang, 12 Mei 2022

Nomor : 120 / 0167 / II

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Tindaklanjut/ Tanggapan
terhadap Rekomendasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung terhadap Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
(Daftar terlampir)

di -
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/7/DPRD/2022 Tanggal 28 April 2022 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 yang merupakan catatan-catatan strategis berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta agar Saudara segera memberikan tanggapan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dan disampaikan kepada Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung cq. Kepala Biro Pemerintahan paling lambat tanggal 20 Mei 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 198902 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/111/AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2021

7 Maret 2022

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
di
Pangkal Pinang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh nilai **71,66** atau predikat **BB**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,63	24,29
b.	Pengukuran Kinerja	25	17,24	17,82
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,29	11,32
d.	Evaluasi Internal	10	6,39	6,53
e.	Capaian Kinerja	20	12,40	11,70
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,96	71,66
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Uraian hasil evaluasi selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya. Adapun beberapa catatan terkait hasil evaluasi implementasi SAKIP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:
 - a. Masih terdapat beberapa rumusan tujuan, sasaran serta indikator kinerja utama, khususnya di level OPD yang belum berorientasi hasil, dan indikator yang diperjanjikan belum menjawab ukuran-ukuran seharusnya dari tugas, fungsi maupun isu strategis dari OPD;
 - b. Penjabaran (*cascading*) kinerja telah dilakukan secara berjenjang sampai ke level Eselon IV dan pelaksana, namun belum seluruhnya didasarkan pada kinerja organisasi dan level di atasnya. Hal itu akan menimbulkan ketidaksesuaian terhadap ukuran kinerja individu yang dihasilkan, dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemberian *reward and punishment*;
 - c. Laporan kinerja yang disusun belum secara deskriptif menjelaskan analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja, dan belum mengaitkan analisa tersebut dengan rekomendasi maupun tindak lanjut atas keefektifan program atau kegiatan dalam upaya mencapai kinerja tersebut;
 - d. Aplikasi telah dikembangkan, namun masih belum sepenuhnya terintegrasi dan belum optimal pemanfaatannya;
 - e. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja telah dilakukan, namun belum sepenuhnya menjadi masukan untuk penyempurnaan di periode selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya;
2. Melakukan penyempurnaan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama pada setiap level organisasi agar lebih berorientasi pada hasil dan memiliki Indikator yang relevan maupun terukur, sehingga ada keselarasan dalam penjabaran kinerja mulai dari level Provinsi, OPD sampai ke individu;
3. Menyusun dan menyempurnakan proses bisnis yang mengacu pada kinerja di tiap entitas dan menggunakan hasilnya sebagai ukuran kinerja bagi tiap individu;
4. Menyempurnakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja dalam rangka peningkatan kualitas penerapan tata kelola Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta memaksimalkan pemanfaatan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan, dan sebagai dasar pemberian *rewards and punishment*. Aplikasi tersebut juga diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang semakin andal serta meningkatkan kualitas laporan kinerja;

5. Meningkatkan kualitas pelaporan baik laporan monitoring triwulanan, maupun laporan kinerja tahunan dengan berfokus pada analisis faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan/kegagalan dalam capaian kinerja, serta analisis terhadap efektivitas program/kegiatan serta sumber daya yang ada terhadap capaian kinerja, sehingga bisa memberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam penentuan strategi dan perbaikan kinerja di periode berikutnya;
6. Meningkatkan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya penyempurnaan secara terus menerus mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja, sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan tidak terpisahkan, dan nantinya akan berpengaruh terhadap penyempurnaan implementasi SAKIP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP secara berkelanjutan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Deputi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 773 /VI/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2026, akan berimplikasi terhadap perubahan Atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 45 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN :

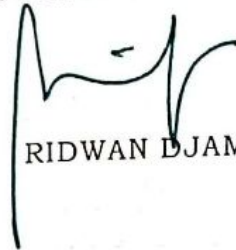
Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj.GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 773 / VI/2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET				Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	PD Penanggung jawab
			Tahun 2021	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	7,78*	4,23	4,23	4,43	4,60	Pertumbuhan barang dan jasa sub sektor pertanian	$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$ PDRBi(t) : PDRB sub sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sub sektor i tahun t-1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-9,76	3,85	4,05	4,25	4,45	Pertumbuhan barang dan jasa sub sektor perikanan	$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$ PDRBi(t) : PDRB sub sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sub sektor i tahun t-1	Dinas kelautan dan perikanan
3	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	-9,23	2,95	4,52	1,75	0,46	Pertumbuhan barang dan jasa sub sektor pertambangan dan penggalian	$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$ PDRBi(t) : PDRB sub sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sub sektor i tahun t-1	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, DLHK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET				Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	PD Penanggung jawab
			Tahun 2021	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	-5,64	1,86	3,25	4,50	4,55	Pertumbuhan barang dan jasa sub sektor industri pengolahan	$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$ PDRBi(t) : PDRB sub sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sub sektor i tahun t-1	DISPERIN DAG
5	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	-4,62	6,50	4,94	5,50	5,55	Pertumbuhan barang dan jasa sub sektor perdagangan	$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$ PDRBi(t) : PDRB sub sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sub sektor i tahun t-1	DKUMKM
6	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	43,00	2,70	2,63	2,56	2,50	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan asing dan domestik	$\frac{\sum W(t) - \sum W(t-1)}{\sum W(t-1)} \times 100\%$ $\sum W(t)$: jumlah wisatawan tahun t $\sum W(t-1)$: jumlah wisatawan tahun t-1	DISBUD PARKEPORA
7	Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	106,95	8,13	7,51	6,99	6,53	Pertumbuhan jumlah ekspor	$\frac{\sum W(t) - \sum W(t-1)}{\sum W(t-1)} \times 100\%$ $\sum W(t)$: jumlah ekspor tahun t $\sum W(t-1)$: jumlah ekspor tahun t-1	DISPERINDAG, DKUMKM

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET				Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	PD Penanggung jawab
			Tahun 2021	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	-39,68	25,00	30,00	30,77	34,12	Pertumbuhan nilai investasi	$\frac{\sum W(t) - \sum W(t-1)}{\sum W(t-1)} \times 100\%$ $\sum W(t)$: jumlah nilai investasi tahun t $\sum W(t-1)$: jumlah nilai investasi tahun t-1	DPMPTSP, DKUMKM, DISPERINDAG, DESDM
9	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,69	71,91	72,13	72,35	72,57	Besarnya indeks pembangunan manusia menurut provinsi	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$ Dimensi Kesehatan : I kesehatan $= \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ Dimensi Pendidikan : I HLS $= \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{ALS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{ALS}}{2}$ Dimensi Pengeluaran: $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$	DINAS PENDIDIKAN, DIBUDPARKEPO RA, DINAS KESEHATAN, RSUP, RSJ

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET				Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	PD Penanggung jawab
			Tahun 2021	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	77,79	77,39	78,40	79,41	80,42	Nilai indeks lembaga demokrasi provinsi dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	$IDI_{Provinsi} = \sum_{i=1}^3 P_i / (A_i)$ $IDI_{Provinsi} = \text{Indeks demokrasi Indonesia provinsi}$ $P_i = \text{Nilai penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-} i \text{ (} i = 1, 2, 3 \text{)}$ $I(A_i) = \text{Indeks aspek ke-} i$ $(i-1) = \text{aspek kebebasan sipil}$ $(i-2) = \text{hak-hak politik}$ $(i-3) = \text{lembaga demokrasi}$	SAT POL PP, KESBANGPOL, DP3CSKB
11	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	68,25	69,00	69,75	70,50	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB Tahun ini dikurang Nilai RB tahun lalu dikali 100%	SELURUH PERANGKAT DAERAH
12	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	39,45	25,50	49,51	69,85	100	Pemerataan ketersediaan infrastruktur	$\frac{\text{Jumlah infrastruktur yang akan dibangun} \times 100\%}{\text{Jumlah infrastruktur yang tersedia}}$	DPUPRPERKIM, DISKOMINFO
13	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	Luas wilayah yang sesuai peruntukan dalam RT/RW dibandingkan dengan luas wilayah provinsi	$\frac{\text{luas wilayah sesuai peruntukan dalam RTRW}}{\text{luas wilayah Provinsi}}$	DPUPRPERKIM
14	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana	(50% kampung tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi) dikali 100	BPBD, DINSOSPEMDES
15	Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	0,704	0,721	0,730	0,739	0,748	Meningkatkan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi	$\text{Indeks Varibel} = \frac{(\sum \text{indikator } X)}{(\text{Nilai maksimum } (X))}$ $IDM = \frac{1}{3 (IS \times IE \times IL)}$	DINSOSPEMDES

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET					Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	PD Penanggung jawab
			Tahun 2021	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
									IS = Indeks Sosial IE = indeks Ekonomi IL = Indeks Lingkungan		
16	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,93	1,79	1,74	1,70	1,68	Pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk	$r = \left\{ \left(\frac{P_t}{P_o} \times \left(\frac{1}{t} \right) - 1 \right) \times 100 \right.$ r = laju pertumbuhan penduduk Pt = jumlah penduduk pada tahun t Po = jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan Po $P_t = P_o + (B - D) + (M_i - M_o)$ Pt = jumlah penduduk pada tahun t Po = jumlah penduduk pada tahun dasar B (birth) = jumlah kelahiran selama periode 0 – t D (death) = jumlah kematian Mo = jumlah migrasi keluar selama periode 0 – t Mi = jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t	DP3CSKB, BIRO PEMERINTAHAN	
17	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,67	4,30	4,20	4,10	4,01	Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan	DINSOSPEMDES, DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DKUMKM, DISPERINDAG	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET				Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	PD Penanggung jawab
			Tahun 2021	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk	
18	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,03	4,47	4,39	4,26	4,19	meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	$\frac{\text{jumlah penganggur terbuka pada angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100$	DINAS PENDIDIKAN, DINAS TENAGA KERJA, DINSOSPEDES, DP3CSKB
19	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	75,43	75,84	76,7	77,5	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan	IKLH Provinsi = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL) IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup IKA = indeks kualitas air IKTL = indeks kualitas tutupan lahan	DLHK, DPUPRPERKIM

Pj.GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN